

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG
BARAT NO. 55 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
(Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Ibnu Mahendra W.M

NPM : 1721020202

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN
2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PASAR
(Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**IBNU MAHENDRA W.M
NPM : 1721020202**

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos,MH.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah menurut para ulama adalah untuk kemaslahatan umat. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Liwa Lampung Barat, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019. Akan tetapi pada pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Diduga dalam pelaksanaan pemungutan retribusi adanya suatu pemungutan pembayaran yang tidak ditemukan dalam peraturan Bupati.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi yang ada pada Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 pada Masyarakat pasar Liwa dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pemungutan retribusi pasar yang ada di pasar Liwa Lampung Barat sesuai dengan peraturan bupati No.55 Tahun 2019 pada masyarakat pasar Liwa.

Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Liwa Lampung Barat, belum terlaksana oleh masyarakat Pasar Liwa hasilnya dikarenakan penerapan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan Bupati di Pasar Liwa karena kebijakan peraturan dalam pengelola pasar berbeda dengan kebijakan peraturan Bupati Lampung Barat dimana dalam pengelolaan retribusi keamanan tidak ada dalam peraturan tetapi disahkan serta dijalankan oleh pengelola pasar liwa dan Menurut hukum Islam pratik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan besarnya kharaj yaitu luas lapak sewaan yang disewakan UPT Pasar Liwa kepada para pedagang sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perbup dan sudah pula memenuhi ketentuan Ushr yaitu para pedagang membayar retribusi Pasar kepada UPT Pasar Liwa Lampung Barat yang telah ditentukan, namun belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yaitu manfaat jasa belum bisa diambil secara penuh. Tidak sah bagi UPT Pasar Liwa karena dalam *ijarah* tersebut jika manfaatnya tidak bisa diambil oleh pedagang.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Mahendra W.M

NPM : 1721020202

Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2021

Penulis,

Ibnu MahendraW.M
1721020202

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarama I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PASAR (Studi di Pasar Liwa
Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Ibnu Mahendra W.M

NPM : 1721020202

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lily Faizal, S.Sos, MH.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP. 197611042005011010

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.

NIP. 19803152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Almarhum J. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NO. 55 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)"**

dissusun oleh Nama: Ibnu Mahendra W.M NPM: 1721020202, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal : Rabu, 9

Juni 2021

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Henry Iwansyah, M.A

Sekretaris

Kartika, S, M.Pd

Penguji Utama

Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji Pendamping I

Dr. Liky Faizal, S.Sos,MH.

Penguji Pendamping II

Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala, yang telah meimpahkan karunia, taufiq, dan hidayahnya-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, persembahkan tugas akhir ini dari rasa terimakasih ku persembahkan untuk:

1. Ayahandaku Mukti Herlian S.E, dan Ibundaku Rita Fitri S.Ag, yang selalu mendoakan serta selalu memberikan arahan dan motivasi kepada ku dalam meraih kesuksesan serta ridho-Nya.
2. Adik ku Sazali Al-afghani, Muhammad Rizal Fikri, Fajaronnajah, Azra Zahira Faiza Mukti,
3. Almamater ku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan ku dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Ibnu Mahendra W.M, dilahirkan di Kota Bumi 11 Juli 1998, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan bapak Mukti Herlian S.E dan ibu Rita Fitri S.Ag, penulis bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra Desa Wates Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pembina pada tahun 2004, lalu menyelesaikan pendidikan nya di MIN 2 Wates pada tahun 2010, lalu menyelesaikan pendidikan nya di Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami di Bogor Jawa Barat pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan menengah atas nya di MAN 1 Lampung Barat dan tamat pada tahun 2016, dan penulis juga melanjutkan pendidikan studi perguruan tingginya di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selain dari itu penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Atas segala limpah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)” yang disusun untuk melengkapi salah satu syarat penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di *yaumul akhirat* kelak.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyah Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos,MH. selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
6. Kepada perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden intan Lampung
7. Kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Diskoperindag Lampung Barat Bapak Salafidin, MIP

8. Kepada Kepala UPT Pasar Liwa Lampung Barat Bapak Noviansyah
9. Kepada kedua orang tua ku yang telah mendukung ku dalam segala hal terimakasih Ayah dan Ibu
10. Kepada seluruh keluargaku adik ku Sazali Al-afghani, Muhammad Rizal Fikri, Fajaronnajah, Azra Zahira Faiza Mukti serta keluarga besar ku
11. Motivator ku Erma Sustika Dewi dan sahabat-sahabat ku Dirham, Muhammad Sobary, Hendra Mahendra, Riski Fajar Ramadhan, Reza Al-ghifari, Ari Sadewo, Tantri Irawan, Dan Atila Ratin Oktaviani yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Siyasah Syar'iyah Hukum Tata Negara Angkatan 2017, khususnya kelas H yang telah memberikan dukungan, do'a serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut menjadi amal dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna menghasilkan karya yang baik lagi. Semoga penyusun skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Robbal 'Alamin.

2021

Bandar Lampung,

Penulis

IBNU MAHENDRA W.M
NPM. 1721020202

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis.....	8
H. Tinjauan Pustaka.....	8
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Retribusi dan Pasar	17
a. Konsep Retribusi.....	19
b. Konsep Pasar.....	26
2. Perbedaan Retribusi dengan Pajak	31
B. Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Islam	33

1. Pajak dalam perspektif hukum Islam 37
2. Retribusi dan Pajak dalam Hukum Islam 39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	60
1. Profil Kabupaten Lampung Barat Batas wilayah kabupaten lampung barat	60
a. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat ..	60
b. Visi Kabupaten Lampung Barat	62
c. Misi Kabupaten Lampung Barat	62
2. Sejarah Kabupaten Lampung Barat Asal Muasal Skala Brak Bupati Lampung Barat Dari Masa ke Masa.....	63
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	69
1. Gambaran Umum Pasar Liwa Letak Denah Lokasi Pasar Liwa.....	69
2. Struktur Organisasi Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Pasar	71
3. Data Statistik Unit Pasar Liwa.....	72
4. Pengembangan Pasar Struktur Organisasi Pengelola Pasar Liwa	72
5. Jenis Tempat Dagangan.....	72
6. Jenis Barang Dagangan	73
7. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Praktik Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar	73

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Yang Ada Di Pasar Liwa Lampung Barat Sesuai Dengan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2019 Pada Masyarakat Pasar Liwa	82
---	----

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemungutan Retribusi Pasar Yang Ada Di Pasar Liwa Lampung Barat.....	86
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jenis dan Tarif Retribusi Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit	
2.2 Ketetapan Jizyah Pada Masa Khalifah Umar	
3.1 Bupati Lampung Barat Dari Masa ke Masa	
3.2 Jenis Tempat Dagangan Pasar Liwa Lampung Barat	
3.3 Jenis barang Dagangan Pasar Liwa Lampung Barat	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Denah Lokasi Pasar Liwa Lampung Barat	
3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Serta Pengembangan Pasar	
3.3 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Liwa	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)”**.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹ Sedangkan Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.² Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.³ Pemungutan adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁴ Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko

¹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002). 67.

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2004).

³ Nurdin Usban, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 70.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (2009).

di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Liwa Lampung Barat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dengan pengelolaan yang dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan bupati No. 55 Tahun 2019 akan menjadikan retribusi pasar menjadi aset yang nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Alasan Memilih Judul

Judul dalam penelitian ini terbentuk, karena adanya sebuah masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Objektif

Mengingat peraturan bupati Lampung Barat sudah sesuai dengan Implementasi yang ada di lapangan akan tetapi memiliki kejanggalan dari pelaksanaan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar.

2. Subjektif

Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan keilmuan penulis pelajari di Jurusan Hukum Tata Negara serta tersedianya literatur-literatur yang terdapat dipergustakaan yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila adanya sumber penerimaan

⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010). 73.

yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya persediaan pendanaan dan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintah yang disertakan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak, retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber sumber pendapatan lain yang sah. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu : “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah Pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial

yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar.

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah menurut para ulama adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah suatu kewajiban.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Liwa Lampung Barat, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019. Akan tetapi pada nyatanya terkadang pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Lampung Barat yang mana dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diduga adanya suatu pemungutan pembayaran yang di dalam peraturan bupati tersebut tidak ditemukan pemungutan retribusi tersebut. Sehingga dengan adanya fenomena diatas penulis tergelitik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)’’.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dengan fokus dan subfokus sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan retribusi pasar
- b. Undang-undang yang berkaitan dengan retribusi pasar
- c. Hukum Islam yang berkenaan dengan retribusi pasar

E. Rumusan Masalah

Dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pemungutan retribusi pasar yang ada di pasar Liwa Lampung Barat sesuai dengan peraturan bupati No.55 Tahun 2019 pada Masyarakat pasar Liwa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemungutan retribusi pasar yang ada di pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi yang ada pada Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 pada Masyarakat pasar Liwa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pemungutan retribusi pasar yang ada di pasar Liwa Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademik maupun non akademik. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ditinjau dari teoritis dan praktis.

1. Secara Ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan materi Hukum Tata Negara tentang pedoman Tata Negara.

2. Secara Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi di lembaga pendidikan dan dinas PAD serta masyarakat di Indonesia khususnya bagi peneliti selanjutnya. Supaya diketahui lebih jelasnya mengenai Pendapatan daerah dan pelaksanaan di lapangan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Ainun Lativah, “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Asas yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.⁶
2. Harlan Evan kopioru” Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum” ia menyebutkan bahwa atas perkembangan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap total penerimaan PAD, periode tahun 2009 sebesar 1,62 % dan menurun terus menjadi 1,52% tahun 2013. Penerimaan retribusi daerah, pada Tahun 2009 sebesar 4,17 % dan menurun menjadi 3,08 % pada tahun 2013. Selanjutnya penerimaan retribusi jasa umum sebesar 1,66% tahun 2009 dan menurun hingga tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat menjadi 1,70 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa, kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum belum menunjukkan peranan yang signifikan terhadap pembentukan PAD Kota Kupang. Faktor – faktor yang menyebabkan kecilnya angka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah; Faktor sistem manajemen penanganan parkir dan faktor sistem pemungutan retribusi parkir yang belum berjalan secara baik. Berdasarkan

⁶ Ainun Lativah, “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pendekatan ROCCPI ditemukan perilaku bermasalah terjadi pada semua pemegang peran.⁷

3. Cahyadi “Skripsi Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam” di dalam skripsinya disebutkan bahwa kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 sebesar 0,31%. Kontribusi masih kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, dapat dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunnya, akan tetapi masih banyak kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka. Dan sistem pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka bertolak belakang dengan Islam.⁸

H. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari

⁷ Harlan Evan Kapioru, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>.

⁸ Cahyadi, “Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam” (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

⁹ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2017). 41.

subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁰ Mengingat penelitian ini turun ke lapangan secara langsung, maka dalam mengumpulkan data-data mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana implementasi peraturan bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (studi di pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat)

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis unit analisis yaitu:

- a. Berfokus pada struktur (*structure focused*) yaitu organisasi Dinas Koperindag bidang pengelolaan dan pengembangan pasar dan UPT Pasar Liwa Lampung Barat.
- b. Berdasarkan sudut pandang (*worldview based*) yaitu para pedagang Pasar Liwa Lampung Barat.

4. Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni data primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian meliputi:

- a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini yang menjadi data primer dapat berupa literature yang berkaitan dengan pelaksanaan

¹⁰ Etta Mamang Sangadji and Sopiah, *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). 21.

pemungutan retribusi di pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, AL-Qur'an, Hadist, menelaah peraturan Bupati Lampung Barat, buku tentang ketatanegaraan dll.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah Kamus-Kamus, jurnal, dll.

5. Pengumpulan Data

- a. Observasi, sebagai metode ilmiah bisa diartikan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Jadi *observasi* adalah pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan orang yang diobservasi. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.¹² Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.
- b. Interview, Interview ini sering disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan. Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh penulis untuk meneliti keadaan seseorang. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.¹³ Misalnya

¹¹ Usman and Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*...., 52.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 26.

¹³ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 36.

untuk mencari tahu tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.

- c. Dokumentasi, teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview maupun observasi. Dimana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dimana penelitian sedang berlangsung.¹⁴ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Adapun data yang akan diteliti adalah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.

6. Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir *Deduktif*, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵ Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa *kualitatif*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami skripsi ini maka akan digunakan sistematika berikut:

Bab pertama dalam bab Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat) ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Penegasan Judul, Latar belakang Masalah,

¹⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 75.

¹⁵ Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dalam bab Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat) ini akan menjelaskan tentang Landasan Teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi konsep retribusi, konsep pasar, perbedaan pajak dan retribusi, pajak dalam perspektif hukum islam yang meliputi definisi retribusi dan pajak dalam hukum islam, Dasar Hukum tentang *anfal*, *ghanimah*, *fa'i* dan *khums*

Bab ketiga dalam bab Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat) ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Lampung Barat, lokasi penelitian, struktur organisasi pengelola pasar, jenis tempat dan jenis barang dagangan pasar, serta proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Bab keempat dalam bab Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat) ini akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat.

Bab kelima dalam bab Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat) ini akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian akan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan .¹ Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh 30 pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas/sarana pasar.²

¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah...*, 73.

² Rohandi, "Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010- 2014" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017). 29.

a. Konsep Retribusi

1) Pengertian Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari Pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu:

- a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya,
- b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Ciri pokok retribusi adalah:
 - a) Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - b) Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
 - c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.³

2) Fungsi dan Manfaat Retribusi

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan

³ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 110.

retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a) Sumber Pendapatan Daerah

Jika Daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah.

b) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan benar.

c) Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

d) Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Manfaat dari Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi

pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan Peraturan Daerah.

3) Dasar Hukum Retribusi Pasar

- a) Undang-Undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
- f) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di

Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017;

4) Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah dirubah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor ke kas daerah.

5) Ketentuan Retribusi

Obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios, dan toko serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh pemerintahan daerah dan khusus disediakan pedagang kecuali pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola pemerintah daerah. Yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

6) Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

Adapun hak dan kewajiban pedagang Pasar Kabupaten Lampung Barat khususnya Pasar Liwa sebagai berikut:

- (1) Hak-hak pedagang pasar meliputi:
 - (a) Mendapatkan pelayanan tempat jual beli lapak di pasar berdasarkan izin penempatan lapak yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten lampung barat.
 - (b) Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban pedagang pasar meliputi:

- (a) Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar atau pemakaian fasilitas pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Menjaga keamanan dan kebersihan dimasing-masing lapak yang ditempati.
- (c) Mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

7) Penentuan Tarif Pasar

Adapun penentuan tarif retribusi di pasar liwa kabupaten lampung barat sebagai berikut:

Tabel.2.1

Jenis dan Tarif Retribusi Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit

NO	JENIS RETREBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Rumah Toko	RP.290.000,-/M ² /TH
2.	Toko Pasar Liwa	RP.130.000,-/M ² /TH
3.	Toko Hamtebiu	RP.460.000,-/ M ² /TH
4.	Kios	RP.700,-/ M ² /Pdg/Psr
5.	Los	RP.400,-/ M ² /Pdg/Psr
6.	Pelantaran/Hamparan	RP.2.000,-/M ² /Pdg/Psr
7.	Kebersihan Pasar	RP.2.000,-/ M ² /Pdg/Psr

2. Konsep Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁴ Menurut Philip kotler pasar terdiri dari konsumen/pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi, sehingga dapat memuaskan

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 301.

kebutuhan dan keinginan tersebut.⁵ Dhl dan Hammod, memberikan pengertian pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik.⁶

Pasar merupakan aktivitas pembentukan harga dari suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besar permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat artikan bahwa pada umumnya pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

a. Sejarah Pasar

Zaman dahulu, manusia sudah berkaitan erat dengan pusat kegiatan komersil dengan sebutan pasar. Awalnya, pasar di zaman prasejarah menggunakan sistem barter yakni menukarkan satu barang dengan barang

⁵ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. 98.

⁶ Yogi, *Ekonomi Manajemen Pendekatan Analisis Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). 5.

⁷ Sadono Soekirno, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). 42.

lainnya. Selama perkembangannya, sistem barter ini mengalami banyak sekali kendala. Salah satunya adalah nilai barang yang tidak sesuai dengan barang yang ditukarkan. Masalah lainnya adalah waktu dan jarak tempuh yang sangat mempersulit masyarakat dalam menukarkan dan memindahkan barang-barangnya.

Tempat yang dipakai untuk menukarkan barang tersebutlah yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah pasar. Saat uang mulai muncul, manusia menukarkan barangnya dengan sistem jual beli. Jika dulu masyarakat pergi ke pasar pulang dan pergi sesuai dengan kebutuhan, kini sudah banyak individu atau sekelompok individu yang sengaja menggeluti bidang perdagangan. Di mana di sanalah mereka

sengaja membuat tempat permanen untuk menjajakan barang dagangannya, dan mempermudah masyarakat untuk mencari barang yang diperlukannya.

b. Syarat Dapat Disebut Menjadi Pasar

Sebuah pasar, bisa terjadi jika terdapat beberapa syarat, antara lain:

- 1) Terdapat penjual dan pembeli
- 2) Terdapat interaksi antara penjual dan pembeli atau melakukan transaksi jual beli
- 3) Terdapat barang dan jasa yang diperjual belikan
- 4) Terdapat media dan tempat untuk melakukan interaksi antara penjual dan pembeli

c. Jenis-Jenis Pasar

Pada umumnya pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunannya biasanya terdiri dari kios kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barkode*),

berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.⁸

1) Jenis-jenis pasar menurut bentuk kegiatan

Jenis pasar ini dibagi menjadi 2 yaitu pasar nyata atau pasar tidak nyata. Berikut penjelasannya :

a) Pasar Nyata

Pasar nyata merupakan sebuah pasar dimana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional.

b) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan sebuah pasar dimana terdapat para pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham.

2) Jenis-jenis pasar menurut transaksi

Jenis pasar ini dibedakan menjadi pasar tradisional serta pasar modern.

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional dimana para pembeli dan penjual dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari.

b) Pasar Modern

Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya

⁸ Rani Hapasari Kusuma Asri, "Analisis Perbandingan Sikap Konsumen Dalam Memilih Pasar Tradisional Dan Pasar Modern" (Universitas Lampung, 2010). 63.

pasar modern adalah plaza, mal dan tempat-tempat yang lainnya. Jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.

(1) Pasar Persaingan Sempurna

Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni yaitu merupakan pasar dimana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar.

(2) Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar jenis ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini para penjual dapat untuk menentukan harga barang. Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda beda atau terdapat berbagai jenis barang.⁹

3. Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi terletak pada balas jasa. “Pembayaran pajak tidak memperoleh balas jasa secara langsung sedangkan retribusi memperoleh balas jasa secara langsung, contohnya retribusi pasar dan retribusi parkir”.¹⁰ Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama-sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut antara lain :

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012). 53.

¹⁰ Luvy Sofiah and Yhudistira Romadhon Ardiansyah, *Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2009). 84.

- a) Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b) Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c) Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d) Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat paksaan pada pajak adalah yuridis yaitu setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda.
- e) Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.¹¹

¹¹ Cahyadi, "Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam." ..., 22.

B. Retribusi Pasar Dalam Islam

Retribusi pasar merupakan salah satu dari bagian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain asli daerah lainnya, yang mana bertujuan untuk membuat kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna mengatur dan mengurus sendiri segala keperluan dan kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing baik pendanaannya maupun sistem yang ada di daerah tersebut sebagai perwujudan asas desentralisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara Rasulullah menyerahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, yaitu pada saat kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal adalah sebagai pihak yang mengurus setiap harta benda kaum muslimin, baik itu berupa pendapatan maupun pengeluaran.¹²

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau Tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (rampasn perang). Pada perang Badar di tahun 2 hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khums* (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan pada saat peperangan.¹³ Selain *khums*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru yaitu berupa uang tebusan dari tawanan yang ditawan pada saat peperangan. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh yang dapat digunakan sepenuhnya untuk negara) adalah *fay'i* yaitu merupakan harta yang diperoleh dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar Piagam Madinah tidak melalui peperangan. Rasulullah juga mendapatkan penerimaan negara dari waaqaf, berupa tanah

59. ¹² Gusfahmi, *Pajak Dan Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹³ *Ibid.*, 53.

pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik yang telah masuk Islam.¹⁴

Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat guna kesejahteraan masyarakat, terkait pembiayaan pada sektor publik oleh negara. Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW meliputi Zakat, kharaj, khums, ghanimah, fai, dan jizyah.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah diwajibkan nya zakat bersamaan dengan turunnya perintah kewajiban salat pada saat Nabi berada di Mekah.¹⁵ Dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil perternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistem penunaianya yang bersifat wajib. Pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.¹⁶

Sumber pendapatan yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada zaman itu adalah kharaj. Kharaj adalah pajak khusus atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam. Kharaj pada era awal islam ketika khaybar ditaklukan, merupakan sebagai pajak tanah yang dipungut dari non-muslim yang kemudian tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik menawarkan untuk mengeolah tanah tersebut sebagai pengganti

¹⁴ *Ibid.*, 54.

¹⁵ *Ibid.*, 91.

¹⁶ Muh Fudhail Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2120>. 244.

sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Jumlah dari kharaj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi tanah tersebut.¹⁷

Kharaj adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan sistem kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (Land productivity) bukan berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanami anggur sedangkan disisi lain ditanami kurma, maka kharaj yang dibayarkan oleh pemilik tanah berbeda.

Para Ulama Syi'ah mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan Ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut Ghonimah, ghanimah adalah pendapatan negara atas harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui kemenangan dalam peperangan. Dalam konteks perekonomian modern sekarang boleh saja menggolongkan barang sitaan sebagai barang ghanimah. Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara islam periode awal. Dasarnya adalah terdapat dalam Al-Quran surah al-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ

عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa

¹⁷ Ibid., 245.

yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ghanimah berbeda dengan *fay'i*, *fay'i* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa mengerahkan kuda atau peperangan baik harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (*kharaj*), pajak kepala (*jizyah*) dan bea cukai (*ushr*) yang dikenakan pada pedagang non muslim.¹⁸ jika pergantian pemerintahan dengan tidak peperangan tetapi dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i* sebagaimana dalam firman-Nya QS Al-Hasyr : 6

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Fay'i menjadi pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut yaitu untuk kebaikan khalayak umum.

Jizyah adalah pajak yang dibebankan diambil dari penduduk non-Muslim yang ada di negara Islam sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara islam.¹⁹ Orang orang non muslim diberi kebebasan dalam

¹⁸ Gusfahmi, *Pajak Dan Menurut Syariah...*, 103.

¹⁹ Amnawaty and Wati Rahmi Ria, "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al- 'Adalah* 12, no. 3 (2015).

melakukan aktivitasnya baik dalam bidang keagamaan mereka dapat bebas beribadah maupun melakukan hal yang lainnya karena mereka mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya pembayaran *jizyah*.

Karena Orang-orang non muslim tidak mengenal zakat fitrah, maka *jizyah* sama saja dengan menarik pajak. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum dengan yang dibayar oleh orang Islam. Jika adapun yang keberatan dengan *jizyah* sebenarnya baik muslim maupun non-muslim sama sama membayar pada pemerintahan karena bagi muslim diwajibkan membayar zakat yang salah satunya adalah zakat fitah setiap tahunnya.

Kafarat menjadi salah satu Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.

Pemerintahan negara muslimin juga memiliki sumber pendapatan lain bukannya hanya penerimaan pokok saja yaitu seperti wakaf (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), hibah, hadiah dan sebagainya yang diterima secara tidak tetap, sebagai landasan waqaf disebutkan dalam Al-Quran :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Negara dapat melakukan pemungutan pajak jika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan tergantung dengan situasi negara pada saat itu.

1. Pajak dalam perspektif hukum Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, secara bahasa *dharibah* dalam penggunaannya memiliki banyak arti namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut secara wajib. Jadi, *dharibah* ialah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun dapat dikategorikan *dharibah*.²⁰ Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai berikut :

a. Yusuf Qardhawi berpendapat

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²¹

b. Gazy Inayah berpendapat

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintahan.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan

²⁰ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>. 168.

²¹ Gusfahmi, *Pajak Dan Menurut Syariah*..., 31.

dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Seperti halnya dengan pajak, retribusi daerah juga merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat suatu daerah atau pemerintahan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Dari beberapa definisi di atas nampak definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim lebih tepat dan mendekati nilai-nilai penting dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :

- 1) Diwajibkan oleh Allah Swt
- 2) Objeknya adalah harta (*al-maal*)
- 3) Subjeknya kaum muslim yang kaya
- 4) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Diperbolehkannya kewajiban memungut pajak atau retribusi alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum, karena dana pemerintahan tidak cukup atau kekosongan Baitul mal untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul

kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah sebuah kewajiban.²²

2. Retribusi dan Pajak dalam Hukum Islam

a. *Anfal, Ghanimah, Fa'i dan Khums*

Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat bahwa *anfal* adalah *ghanimah*, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan *ghanimah* adalah Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Pendistribusiannya hanya untuk kepentingan kaum muslim, Rasulullah SAW telah membagikan *ghanimah* Bani Nadhir kepada kaum muhajirin dan tidak kepada kaum anshar, kecuali sahal bin Hanif dan Abu Dujanah karena keduanya sangat fakir. Rasulullah SAW juga memberikan *ghanimah* kepada muallaf pada perang hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa Khulafaur rasyidin, khalifah berhak membagikan *ghanimah* kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya Fai, jizyah dan kharaj untuk terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.²³

Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir yang melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta dengan menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, adalah sumber pendapatan berupa harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim tanpa melalui peperangan disebut dengan *fa'i*.

Harta *Fa'i* ini menjadi milik Rasulullah saw, sebagian dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata

²² Surahman and Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." ..., 172.

²³ Gusfahmi, *Pajak Dan Menurut Syariah...*, 79-83.

perang setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukkan kedalam baitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fi sabilillah.

b. *Kharaj*

Kharaj merupakan hak kaum muslimin yang diberikan Allah SWT atas tanah yang dilakukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun jalan damai yang merupakan pendapatan negara yang tergolong pendapatan negara fay'i yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.²⁴ Oleh karena itu kharaj dibagi menjadi dua, yaitu : *kharaj unwah* dan *kharaj shulhi*.

Kharaj unwah adalah *kharaj* yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir. Sedangkan *Kharaj shulhi* adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai.²⁵ *Kharaj* ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan penduduk tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang islam, atau ada sebab yang lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dan dikuasai oleh mereka, dengan membayar sejumlah *kharaj* yang ditetapkan. Maka *kharaj* tersebut menepati posisi *jizyah*, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya *kharaj*, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat

²⁴ *Ibid.*, 110.

²⁵ Aulia Nurisma Putri, "Keuangan Publik Islam," dalam Aulia Putri Blogspot, 2019, <https://aulianputri.blogspot.com/2019/09/kharaj-dan-jizyah.html?m=1>. Diunduh tanggal 6 Juni 2021.

memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya.²⁶ Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar ketika akan menetapkan *kharaj* atas tanah sawad. Maka ketika akan menetapkan *kharaj* haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan *kharaj* atas pemilik di luar batas kemampuan pemiliknnya.

Kharaj berbeda dengan *usyur*. *Usyur* adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah *Usyriyyah* yang termasuk tanah *usyriyyah* adalah :

- 1) Jazirah Arab
- 2) Tanah yang penduduknya masuk islam secara damai, seperti di indonesia
- 3) Tanah unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah khaibar
- 4) Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *Usyriyyah*.²⁷

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada para janda, dan orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.

c. *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Dan Menurut Syariah...*, 111.

²⁷ Muhammad Syamsudin, "Pajak Tanah Di Masa Nabi Dan Di Masa Umar Bin Khatib," dalam *NU Online*, 2019, <https://islam.nu.or.id/post/read/102137/pajak-tanah-di-masa-nabi-dan-di-masa-umar-bin-khatib>. diunduh pada 15 Juni 2021..

adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan islam. *Jizyah* merupakan harta kaum muslimin yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil dari penduduk non-muslim setelah melewati satu tahun sebagai biaya untuk perlindungan mereka.

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka memeluk islam, maka gugurlah *jizyah* dari mereka. *Jizyah* diwajibkan untuk orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh, dan mampu membayarnya. Untuk besaran *jizyah*, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar *jizyah*.²⁸ Apabila *jizyah* diberlakukan kepada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap *jizyah* tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.

Tabel.2.2
Ketetapan *Jizyah* Pada Masa Khalifah Umar

No.	Subjek	Tarif
1.	Pekerja manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dan sebagainya	12 dirham per tahun
2.	Kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per tahun
3.	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun dan sebagainya	48 dirham per tahun

d. Ushr

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan *Ahlu Dzimmah* dan kafir

²⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.105

Harbi yang melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut *Ushr* dari pedagang yang melewati batas negara melalui pos-pos perbatasan. Ziyad ibn Judair mengatakan, Umar bin Khattab pernah memperkerjakan saya untuk memungut *Ushr* dan memerintahkan saya agar memungut 10% ushr dari perdagangan kaum muslimin.²⁹ Istilah *ushr* tidak ditemukan didalam Al-Quran tetapi kita dapat menggunakan dua ayat yaitu Surah Al-Baqarah : 267 dan surah Al-An'am : 141 sebagai acuan. Fiman Allah Swt :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِخَازِنِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا

مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman

²⁹ Ibid, h.114

yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

3. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al'-Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian *syara'al-Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyewakan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, dalam waktu tertentu dan dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.³⁰

Dari definisi diatas bahwa akad *Ijarah* adalah merupakan transaksi tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan yang mana disebut sewa menyewa jika objeknya adalah suatu benda dan upah mengupah jika objeknya berupa suatu manfaat. Munculnya *ijarah* adalah suatu bentuk dari akibat kebutuhan akan jasa dan manfaat.

Didalam istilah hukum islam penyebutan untuk seseorang yang menyewakan disebut dengan *mua'jir* sedangkan untuk seseorang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, *ma'jur* untuk benda yang disewakan dan *ujrah* untuk penyebutan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang.

Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa (*Ijarah*) terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

³⁰ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>. 199.

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ ^{٣١}

بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^{٣٢}

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Rukun dan syarat-syarat ijarah sebagai berikut :

- 1) Mu'jir dan musta'jir. Unsur yang terpenting keduanya cakap hukum (berakal) serta dewasa (baligh)
- 2) Sighat ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab dan qabul merupakan bentuk tentang adanya rasa suka sama suka.
- 3) Ujrah, diisyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak
- 4) Barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah mengupah hendaknya diketahui manfaatnya. Manfaat benda yang disewapun diperbolehkan menurut syara' bukan yang dilarang dan benda yang diewakan diisyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad.³¹

Dua sebab yang dapat membatalkan ijarah yaitu rusaknya benda yang diewakan dan hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut.³²

³¹ *Ibid.*, 200.

³² *Ibid.*, 202.

BAB III

OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang Pesisir Barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh Vulkanikquarter dari beberapa formasi. Daerah ini berada pada ketinggian 50 > 1000 mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar ± 20 Km. Pada beberapa tempat dijumpai beberapa aktivitas vulkanik di pemunculan panas bumi.¹

a. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat

Wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan:

- 1) Sebalah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Popinsi Sumatra Selatan).
- 2) Sebelah selatan : Kab. Pesisir Barat dan kab. Tanggamus.
- 3) Sebelah Barat : Kab. Pesisir Barat.
- 4) Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus²

Secara topografi Kabupaten Lampung Barat terbagi menjaadi tiga bagian yaitu daerah Dataran Rendah dengan ketinggian 0-600 m dari permukaan laut, meliputi Kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya serta daerah-daerah berbukit dengan ketinggian 600 – 1000 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Balik Bukit dan

¹ Bagian Humas dan Protokol Setdakap Lampung Barat, “Selayang Pandang Kabupaten Lampung Barat, Menuju Kabupaten Literasi, Konsevasi Dan Siaga Bencana,” (Lampung Barat, 2018).

² *Ibid*

Sumber Jaya serta daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 m dari permukaan laut meliputi sebagian besar Kecamatan Belalau, Sekincau dan lainnya.

Kabupaten Lampung Barat memiliki iklim tipe iklim B yang memiliki jumlah bulan basah 7-9 bulan. Curah hujan di daerah ini berkisar antara 2500 – 3000 mm/tahun atau 140-221 mm/bulan. Secara umum Kabupaten Lampung Barat beriklim tropis humid dengan angin laut lembab bertiup pada Samudra Hindia dengan 2 angin/musim setiap tahunnya.³

Bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat yang bervariasi, mulai dari daerah dataran rendah hingga daerah pegunungan, dengan kemiringan lahan mulai dari *relative* landai (0-15%) hingga curam (>40%), sangat potensial sekali terhadap pengembangan berbagai komoditas pertanian, perkebunan, perternakan, kehutanan, dan pariwisata.

Kabupaten Lampung Barat yang beribu Kota Liwa, secara *administrative* meliputi 15 kecamatan, 5 kelurahan, 131 pekon, dengan luas wilayah 2.141,57km² atau 6,05% dari luas wilayah Provinsi Lampung.

b. Visi Kabupaten Lampung Barat

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Visi ini bermakna:

Masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai

- 1) Hebat : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa
- 2) Sejahtera : Merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan

c. Misi Kabupaten Lampung Barat

- 1) Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.

³ *Ibid*

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik..
- 5) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.
- 6) Program pembangunan.⁴

2. Sejarah Kabupaten Lampung Barat

a. Sejarah Skala Brak

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu pemekran dari Lampung Utara, yang beribu kota di Liwa. Pemilihan Liwa sebagai Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat memang tepat. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini adalah:

- 1) Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah Kabupaten akan relatif efektif.
- 2) Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung Sendiri. Tentang asal usul nama Liwa, menurut cerita orang, berasal dari kata-kata “meli iwa” (bahasa Lampung), yang artinya membeli ikan. Konon dahulunya Liwa merupakan daerah yang subur, persawahan yang luas, sehingga hasil pertaniannya melimpah. Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung⁵

b. Asal Muasal

Sekala Brak (baca: sekala Beghak), adalah kawasan yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabanya. Kawasan ini boleh dibilang kawasan yang “sudah hidup”

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

sejak zaman prasejarah. Batu-batu menhir mensitus dan tersebar di sejumlah titik di Lampung Barat. Bukti, ada tanda kehidupan menjarah.

Sebuah batu prasasti di Bunuk Tenuar, Liwa berangka tahun 996 saka atau tahun 1074 Masehi, menunjukkan ada jejak Hindu di kawasan tersebut. Bahkan ditengah rimba ditemukan bekas parit dan jalan Zaman Hindu. Ada lagi disebut-sebut bahwa kenali yang dikenal dengan sekarang sebagai Ibu Kota Kecamatan Belunguh adalah bekas kerajaan bernama “kendali” dengan “Raja Sapalananlinda” sebagaimana disebut dalam “kitab Tiongkok Kuno”. Kata “Sapalananlinda” oleh L. C Westenenk ditafsir sebagai berasal dari kata “sribaginda” dalam pengucapan dan telinga orang cina. Jadi bukan nama orang tetapi gelar penyebutan. Buku itu juga konon menyebut, bahwa kendali itu berada antara Jawa dan Siam-Kamboja. Kitab itu, menyebut angka tahun antara 4554-464 M. Kitab ini telah disalin kedalam bahasa Inggris oleh Groenevelt.⁶

Meski belum seluruhnya terbaca, namun dapat disimpulkan : disitu tercatat suatu perdaban panjang. Suatu kawasan tua yang mencatatkan diri dalam sejarah umat manusia. Di wilayah ini pula pernah berdiri sebuah kerajaan. Ada yang menyebut kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tulang Bawang, namun bukti-bukti keberadaannya sulit ditemukan. Sedang keyakinan yang terus hidup dan dipertahankan masyarakat khususnya di Lampung Barat serta keturunan mereka yang tersebar hingga seluruh wilayah Sumatra Selatan, menyebutkan Kerajaan Skala Beghak. Pendapat ini juga disokong oleh keberadaan para raja yang bergelar Sai Batin, hingga bukti-bukti bangunan dan alat-alat kebesaran kerajaan, upacara, dan seni tradisi yang masih terjaga. Masih banyak bukti-bukti lain, namun pembahasan terpisah.

⁶ *Ibid*

Jika membaca peta provinsi Lampung sekarang, kisaran lokasi pusat sekala beghak berada hampir seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. “pusat kerajaan” meliputi daerah pegunungan dan lereng Gunung Pesagi di daerah Liwa, seputar Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sukau, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Balik Bukit.

Sebagai kesatuan politik kerajaan politik skala beghak telah berahir. Tetapi, sebagai kesatuan budaya (*cultural based*) kebudayaannya turun-temurun diwarisi melalui sejarah panjang yang menggurat kuat dan terbaca makna-maknanya hingga saat ini. Sekala beghak dalam gelaran peta Tanah Lampung, pastilah tertoreh warna tegas, termasuk sebaran pengaruh kebudayaannya sampai saat ini.

Tata kehidupan berbasis adat tradisi Sekala Beghak juga masih dipertahankan dan dikembangkan. Terutama, Sekala Beghak setekah dalam pengaruh “empat umpu” penyebar Agama Islam dan lahirnya masyarakat adat Sai Batin. Adat dan tradisi terus diacu dalam tata hidup keseharian masyarakat pendukungnya dan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi bangsa.⁷

Hasil pembacaan atas segala yang ada dalam masyarakat kebudayaan Sai Batin di Lampung, memperlihatkan kedudukan dan posisi penting Sekala Beghak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan. Keberadaan Sekala Beghak tampak sangat benderang dalam peta kebudayaan Sai Batin, sebagai suatu tiang sangga utama pembangunan masyarakat Lampung. Bahkan, telah diakui, Sekala Beghak sebagai cikal bakal atau asal muasal tertua leluhur “orang Lampung”. Bahkan keberadaan Sekala Beghak, berada dalam kisaran waktu strategis perubahan peradaban besar di Nusantara, dari Hindu ke Islam.

⁷ *Ibid*

Pada abad 15 datang empat kelompok masyarakat yang menduduki sekitar Danau Ranau. Di sebelah barat danau dihuni orang-orang yang datang dari pagaruyung Sumatera Barat dipimpin Dipati Alam Padang. Sementara itu, tiga kelompok lainnya berasal dari Sekala Beghak. Tiga kelompok orang-orang Sekala. Tiga kelompok orang-orang Sekala Beghak itu dipimpin Raja Singa Jukhu (dari Kepaksian Bejalan Diway), menempati sisi timur Danau. Di sisi timur danau pula, kelompok yang dipimpin pangeran Lianf Batu dan Pahlawan Sawangan (berasal dari Kepaksian Nyekhupa) bertempat. Sementara sekelompok yang dipimpin Umpu Sijadi Helau menempati sisi utara danau. Empu Sijadi Helau yang disebut-sebut itu bukan Umpu Jadi putra Ratu Buay Pernong, yang menjadi pewaris takhta Buay pernong. Kemungkinan besar Umpu Sijadi di daerah Ranau tersebut tersebut adalah keturunan Kepaksian Pernong yang meninggalkan Kepaksian dan mendirikan negeri baru di Tenumbang kemudian menjadi Marga Tenumbang.⁸

Ketiga kelompok dari Sekala Beghak ini kemudian berbaur dan menempati kawasan Banding Agung, Pemantang Ribu, dan Warkuk. Sampai sekarang banyak orang Banding Agung mengaku keturunan Paksi Pak Sekala Beghak. Disamping itu, ada kisah-kisah perpindahan orang sekala beghak, sebagaimana ditulis dalam Wikipedia (7/3/07:04,02), yang dipimpin pangeran Tongkok Podang, Puyan Rakian, puyang Nayan Sakti, Puyang Naga Beringsang, Ratu Pikuluan Siba, Adipati Raja Ngandum, dan Sebagainya. Bahkan, daerah Cikoneng di Banten ada daerah yang diberikan kepada Umpu Junjungan Sakti dari Kepaksian Belunguh atas jasa-jasanya, dan banyak orang Skala Berak yang migrasi ke sana atau sebaliknya. Kisah-kisah ini memperkuat suatu kenyataan bahwa Sekala Beghak tidak hanya sebagai sumber muasal secara geografis, melainkan juga sumber kultur masyarakat. Sekala

⁸ *Ibid*

Beghak adalah hulu suatu kebudayaan masyarakat. Dari Sekala Beghak ini juga lahir huruf Lampung yaitu Kaganga. Bagi sebuah kebudayaan, memiliki bahasa dan aksara sendiri merupakan bukti kebesaran masa lalu kebudayaan tersebut. Di Indonesia hanya sedikit kebudayaan yang memiliki aksara sendiri, yaitu Batak, Lampung (Sumatera Selatan), Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis. Dan kebudayaan yang memiliki aksara sendiri dapat dikategorikan sebagai kebudayaan unggul. Karena bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus symbol kemajuan peradaban.⁹

Semua aksara Nusantara tersebut berasal dari bahasa palava, yang berinduk pada bahasa Brahmi di India. Bahasa Palava digunakan di India dan Asia Tenggara. Dinusantara, bahasa ini mengalami peneybaran dan pengembangan, bermula dari bahasa Kawi, sebagai induk bahasa Nusantara. Dari bahasa Kawi menjadi bahasa: Jawa (Hanacaraka), Bali Surat Batak, Lampung/Sumatra Selatan (Kaganga), dan Bugis. Dari kerajaan Sekala Beghak yang telah memiliki unsur-unsur “kebudayaan lengkap” ini pulalah “idiologi” Sai Batin dilahirkan dan disebarluaskan. Sampai saat ini, masih banyak yang bisa dibaca dari jejak-jejak yang tertinggal. Baik dari jejak fisik maupun jejak yang tidak kasat mata. Dari legenda, seni budaya, adat tata cara bahasa lisan tulisan, artefak benda peninggalan, hingga falsafah hidup masih ada runut rujukannya. Dari Sekala Beghak itu di kemudian hari pengaruh budaya dan peradabanya berkembang dan berpengaruh luas keseluruh Lampung bahkan sampai ke Komering di Sumatera Selatan Sekarang. Tidak terhitung kemudiam “pendukung budaya” nya yang tersebar diseluruh Indonesia pada masa kini.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Tabel. 3.1
Bupati Lampung Barat Dari Masa ke Masa

No	Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Masa jabatan
1.	Letkol. Chb. Hakim Saleh Umpu Singa	-	1991-1997
2.	Drs. Indra Ismail Bangsawan	-	1997
3.	Letkol I Wayan Dirpha	-	1997-2002
4.	Erwin Nizar T	Drs. Mukhlis Basri, MM	2002-2007
5.	Drs. Mukhlis Basri, MM	Drs. Dimyati Amin	2007-2012
6.	Drs. Mukhlis Basri, MM	Drs. H. Makmur Azhari	2012-2017
7.	Parosil Mabsus	Mad Hasnurin	Pertahanan

Sumber data: Diperoleh dari Kantor DISKOPERINDAG Lampung Barat

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Liwa

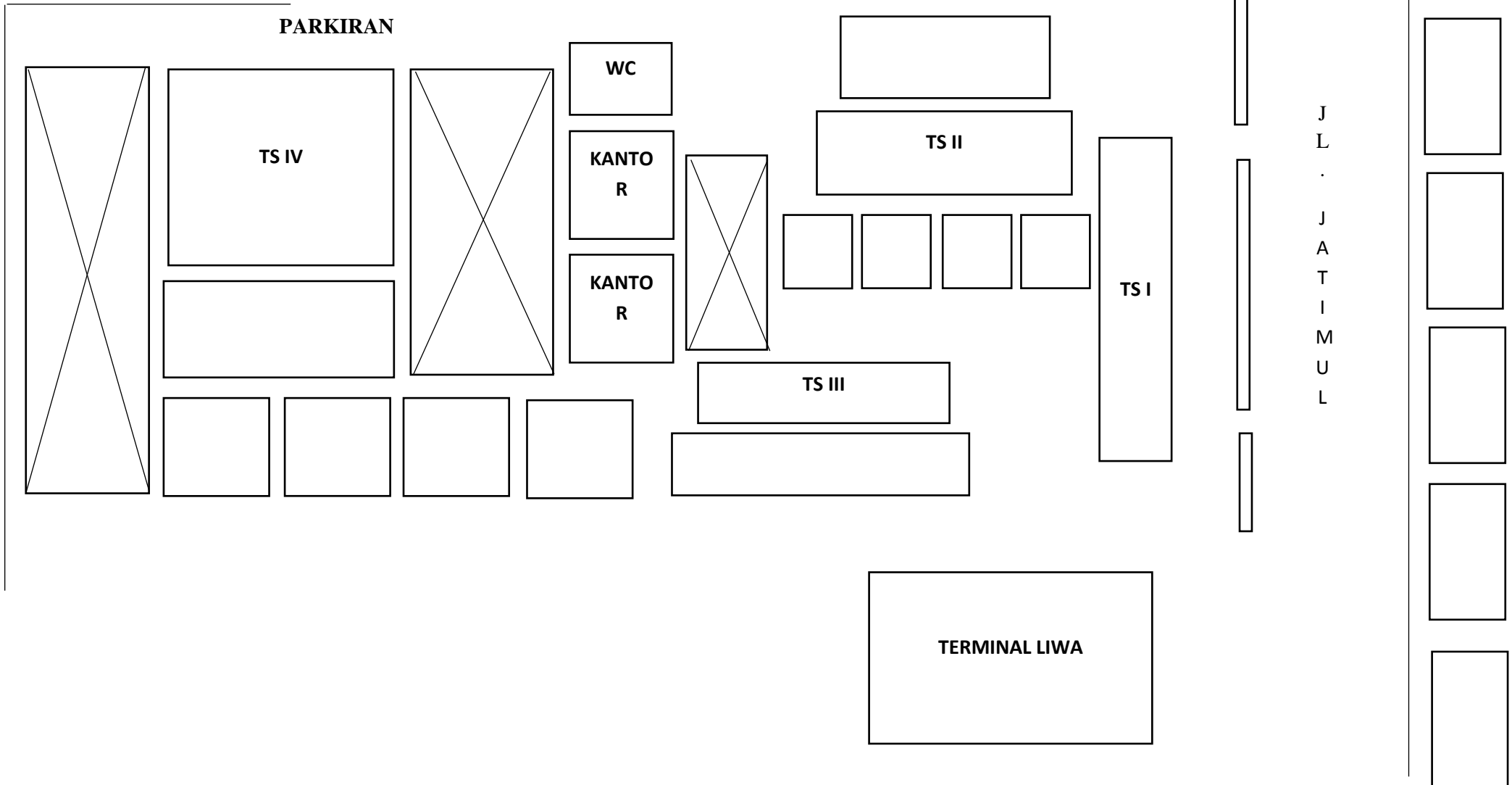
Pasar Liwa Lampung Barat terletak di wilayah Jalan Hasan Basri, yang berada di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data dari Tahun 2019 sampai saat ini, jumlah pedagang di pasar liwa berjumlah 247 pedagang yang berdagang dengan berbagai macam jenis dagangan sandang dan pangan seperti sayur-sayuran, pakaian, berbagai jenis ikan konsumsi baik ikan air tawar maupun air laut, perhiasan seperti emas perak dan kuningan, daging sapi, daging ayam, kue, tempe tahu, bumbu rempah-rempah peralatan pecah belah serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Pasar liwa di Kabupaten Lampung Barat ini termasuk salah satu pasar yang luas dan besar, luas

tanah serta bangunan pasar ini cukup besar yaitu $\pm 300 \times 70 \text{ M}^2$ yang cukup untuk menampung para pedagang pasar liwa itu sendiri dan para pembeli serta memiliki parkir dan lapak dagangan yang luas dan lapang.

Sebelum menjadi salah satu pasar Kabupaten di Lampung Barat yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang pengelolaan dan pengembangan pasar, pasar liwa ini dahulu adalah pasar pekon (desa) yang dikelola oleh masyarakat pasar liwa itu sendiri dan dengan seiring berjalannya waktu masyarakat kelurahan pasar liwa pun menyerahkan pasar liwa kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lampung Barat untuk dikelola sepenuhnya.

2. Letak Denah Lokasi Pasar Liwa

Gambar.3.1
Denah Lokasi Pasar Liwa Lampung Barat

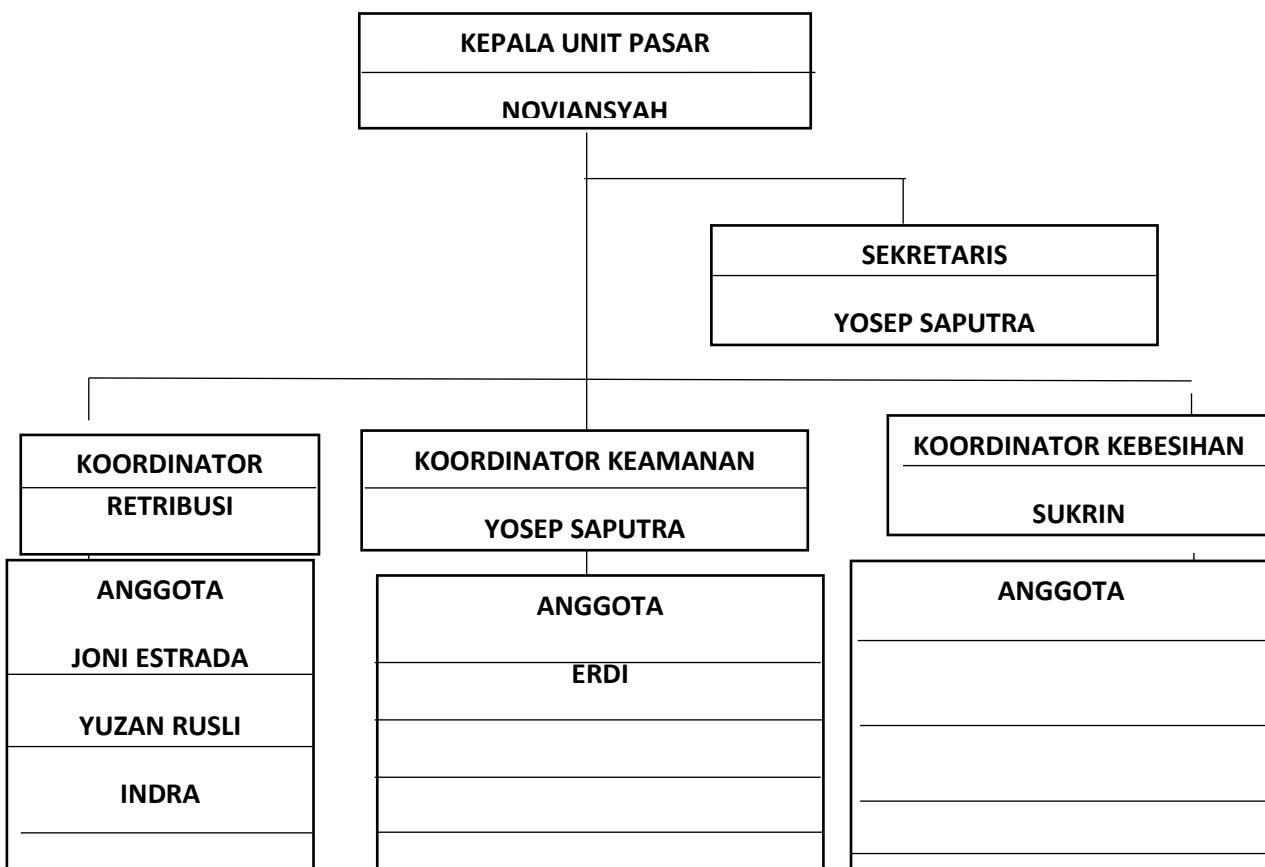


3. Data Statistik Unit Pasar Liwa

Gambar.3.2
Struktur Organisasi Dinas Koperindag Bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Pasar



Gambar.3.3
Struktur Organisasi Pengelola Pasar Liwa



a. Jenis Tempat dan Barang Dagangan

Adapun jenis tempat dan barang perdagangan di pasar liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel.3.2
Jenis Tempat Dagangan Pasar Liwa Lampung Barat

No	JENIS	Ditempati	Kosong	Jumlah	Ket.
	tempat dagang				
1	Kios	62	10	72	
2	Los	99	5	104	
3	Hamparan				Fluktuatif

Sumber data: Diperoleh dari Kantor UPT Pasar Liwa

Tabel.3.4
Jenis Barang Dagangan Pasar Liwa Lampung Barat

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Pakaian	4
2.	Emas/Jam	4
3.	Kelontongan	4
4.	Sepatu/Sendal	8
5.	Warung Makan	3
6.	Sayuran	88
7.	Buah-buahan	25
8.	Beras	18
9.	Kelapa	11
10.	Makanan	24
11.	Tahu/Tempe	12
12.	Daging	9
13.	Ikan	21
14.	Ayam	16

Sumber data: Diperoleh dari Kantor UPT Pasar Liwa

2. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Praktik Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Untuk praktik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Liwa Lampung Barat adalah mengambil pungutan dari los atau lapak ke los atau lapak. Pengambilan pemungutan retribusi dimulai jam 09.00 WIB sampai siang hari, hal ini dikarenakan para pedagang membuka

dagangannya dari pagi sampai siang hari. Yang dilakukan oleh petugas (UPT pasar Liwa). Retribusi dipungut untuk setiap los atau lapak yang beroperasi saja, apabila los atau lapak sedang tutup maka retribusi tidak akan di pungut. Setiap pembayaran retribusi akan diberikan karcis atau bukti pembayaran retribusi. Nominal retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan perbup No. 55 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan pasar.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas (UPT Pasar Liwa) atas pembayaran retribusi pelayanan pasar diantaranya adalah izin menempati lapak, pembersihan pasar yang dilakukan setelah pasar ditutup terlebih dahulu agar petugas kebersihan lebih mudah dalam membersihkan tempat dagangan. Untuk pelayanan keamanan petugas (UPT Pasar Liwa) memberikan pelayanan keamanan guna agar pasar dapat tertib dan aman serta menjaga barang milik para pedagang.

Dan menurut pemaparan pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar ini, dinilai tidak memberatkan dengan tarif yang lumayan rendah. Hal ini disebabkan pembayaran retribusi cukup sesuai dengan penghasilan para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang terdapat di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang pengelolaan dan pengembangan pasar Kabupaten Lampung Barat dan Pengelola Pasar Liwa maupun di lapangan yaitu di pasar liwa mengenai pengelolaan pemungutan retribusi pasar yaitu:

Perencanaan berdasarkan hasil wawancara perencanaan yang dilakukan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang pengelolaan dan pengembangan pasar yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi.

Penentuan target berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salafidin bahwa “penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai setiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target

penerimaan retribusi pasar pertahun setiap pasar”. Kemudian beliau menambahkan bahwa “persoalan mendasar kami selama satu tahun terakhir ini adalah menurunnya penghasilan retribusi dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah mewabah diseluruh Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan retribusi pasar khususnya pasar Liwa.¹¹

Pengorganisasian berdasarkan hasil wawancara di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang pengelolaan dan pengembangan pasar dengan Bapak Salafidin bahwa mereka melakukan pengorganisasian dengan mengukur sumber daya manusia, pembagian tugas serta penetapan standar kerja, sebagaimana hasil wawancara yaitu Bapak Salafidin mengatakan bahwa “Jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah pengelola di setiap pasar dari Dinas Koperindag berjumlah 6-8 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang disetiap hari pasar melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah pengelola kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi”.¹²

Bapak Nazir selaku seksi pendataan dan penanganan retribusi pasar mengatakan bahwa “Untuk lebih memudahkan pekerjaan pengelola pasar pasar di Kabupaten Lampung Barat khususnya pasar Liwa kami membagi pekerjaan, para pengelola biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap pasar terbagi dalam beberapa los seperti los daging, los ikan, los pakaian, los sayur dan lain-lain, sehingga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien”.¹³

Sejalan dengan pendapat di atas Bapak Mustakrip yang merupakan salah satu pengelola juga mengatakan bahwa “Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami dibagi

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*

¹³ Nazir, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, *Wawancara*, Februari 22, 2021.

menjadi beberapa jenis los dagangan, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah los kami dalam melakukan pemungutan”.¹⁴

Pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengelola Pasar Liwa “Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar Liwa Lampung Barat selama ini pengelola memungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis/struk bukti pembayaran retribusi, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”. Kemudian menurut pengelola pemungut retribusi mengatakan bahwa “Selama ini proses pembayaran retribusi sangatlah mudah, kami hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai yang tertera dalam karcis/struk pembayaran retribusi”.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa “Pembayaran sangatlah mudah, petugas memungut retribusi mendatangi kami, dan memberikan karcis/struk pembayaran retribusi yang sudah tertera berapa yang harus dibayar”.

Pengawasan penerimaan retribusi pasar khususnya di pasar liwa lampung barat dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) bidang pengelolaan dan pengembangan pasar.

Pengawasan langsung yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara yaitu kepala UPT Pasar Liwa Bapak Noviansyah mengatakan bahwa “Setiap hari pasar, saya turun ke lapangan, karena itu merupakan tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan apakah pengelola pasar sudah melaksanakan

¹⁴ Mustakrip, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, *Wawancara*, Februari 22, 2021.

tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi di pasar sudah membayar kewajibannya”.

Selain itu beliau menambahkan bahwa “untuk melakukan pengawasan kepada para pengelola maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis/struk pembayaran setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui pengelola mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pemungutan retribusi”.¹⁵

Sedangkan pengawasan tidak langsung berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salafidin Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kabupaten Lampung Barat bahwa “Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawansan terhadap penarikan retribusi perbulannya”.¹⁶

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat. Besarnya penerimaan pendapatan dari hasil retribusi pasar ini akan mempengaruhi besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembayaran retribusi pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Lampung Barat yang memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi pelayanan pasar Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam

¹⁵ Noviansyah, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, Wawancara, Februari 22, 2021.

¹⁶ Salafidin, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, Wawancara, Februari 22, 2021.

kenyataannya, kontribusi penerimaan retribusi pasar di pasar liwa Lampung Barat ini bisa dikatakan masih belum maksimal, dikarenakan pada faktanya dilapangan ada penarikan tambahan jenis retribusi yang peraturannya tidak ada di peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan tambahan jenis retribusi tersebut adalah jenis retribusi keamanan yang dimana peraturan tersebut hanya disahkan oleh pengelola pasar liwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noviansyah selaku Kepala UPT Pasar liwa mengenai retribusi keamanan tersebut bahwa “kami selaku pengelola pasar membuat kebijakan peraturan retribusi keamanan ini guna untuk menjaga keamanan pasar itu sendiri dari berbagai jenis hal yang tidak diinginkan baik siang ataupun malam kami selalu memantau keadaan dan kewanamanan barang-barang yang ditinggalkan oleh pedagang pasar liwa dan apabila ada pedagang yang merasa kehilangan barang dagangannya maka akan sepenuhnya kami pengelola pasar akan menggantinya”.

Hal ini didukung dan disanggupi membayar retribusi tersebut oleh beberapa orang pedagang pasar liwa salah satunya adalah Bapak Nurmatias yang mengatakan “sebagai warga negara saya wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pengelola pasar liwa ini serta saya tidak merasa keberatan untuk membayar retribusi keamanan tersebut dan saya tidak mengeluh dengan adanya penarikan jenis retribusi keamanan tersebut walaupun tidak ada ketetapan yang sah dari peraturan Bupati Lampung barat mengenai retribusi keamanan ini dan untuk barang-barang yang saya tinggalkan di pasar saya selama berdagang di pasar liwa ini belum pernah merasa kehilangan barang”.¹⁷

Mengenai hal ini juga banyak pedagang yang menyanggupi untuk membayar jenis retribusi tersebut tetapi merasa tidak mendapat keuntungan keamanan dari pengelola pasar dikarenakan pengelola pasar ternyata tidak bertanggung

¹⁷ Nurmatias, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, *Wawancara*, Februari 22, 2021.

jawab dan mengganti barang yang hilang sama sekali terhadap pedagang yang kehilangan barang pedangangnya, salah satunya adalah Bapak Edi yang menyatakan bahwa “Sebagai pedagang di pasar liwa saya menyanggupi adanya pembayaran tambahan retribusi keamanan oleh pengelola pasar, dan saya tidak merasa adanya pertanggung jawaban dan penggantian kehilangan barang dagangan sedikitpun dari pengelola pasar jika ada yang sedang mengalami musibah kehilangan barang dagangannya, dan untuk barang dangangan saya selama berdagang di pasar Liwa ini terkadang sering terjadi kehilangan barang tetapi tidak ada pertanggung jawaban sama sekali dari pengelola pasar liwa”.¹⁸

Dan dalam hal ini terdapat juga pedagang yang merasa keberatan membayar retribusi keamanan, Bapak Nandang menyatakan bahwa “Dalam segala jenis peraturan harus disahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah khususnya pemungutan retribusi keamanan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar liwa ini, jadi saya sebagai pedagang pasar liwa merasa keberatan untuk membayar retribusi jenis keamanan tersebut dikarenakan kebijakan tersebut hanya disakan oleh pengelola pasar tetapi tidak disahkan oleh pemerintah daerah”.¹⁹

¹⁸ Edi, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, *Wawancara*, Februari 22, 2021.

¹⁹ BNandang, “Pelaksanaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat”, *Wawancara*, Februari 22, 2021.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

Setelah penulis berhasil mengumpulkan semua data-data yang yang dibutuhkan dari hasil interview ataupun dari wawancara dengan beberapa responden secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 55 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (studi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat), yang kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil penulis adalah melakukan analisis data yang penulis kumpulkan.

Sesuai dengan teknik analisa yang penulis pilih, adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari observasi dan wawancara dan dokumentasi selama penelitian berlangsung, yang dilakukan oleh peneliti di DISKOPERINDAG, UPT Pasar Liwa dan Pedagang Pasar Liwa.

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Yang Ada Di Pasar Liwa Lampung Barat Sesuai Dengan Peraturan Bupati No.55 Tahun 2019 Pada Masyarakat Pasar Liwa

Berdasarkan Perda No. 55 Tahun 2019, Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintahan Daerah dan khusus untuk pedagang. Obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas berupa pelataran, los, kios dan toko serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Adapun hak dan kewajiban pedagang pasar atas pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

1. Hak-hak pedagang pasar meliputi:
 - a. Mendapatkan pelayanan tempat jual beli lapak di pasar berdasarkan izin penempatan lapak yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten lampung barat.

- b. Mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.

Dalam penerapannya hak-hak pedagang belum terpenuhi sepenuhnya karena seperti hak mendapatkan pelayanan keamanan belum tercapai.

2. Kewajiban pedagang pasar meliputi:

- a. Membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar atau pemakaian fasilitas pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjaga keamanan dan kebersihan dimasing-masing lapak yang ditempati.
- c. Mentaati segala perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

Dalam penerapannya pedagang sudah cukup melaksanakan kewajibannya seperti membayar Retribusi pelayanan pasar, berusaha menjaga keamanan dan kebersihan lapaknya masing-masing, dan mentaati peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan di pasar Liwa Lampung Barat. Setiap hari pasar yaitu minggu, selasa dan jum'at pedagang membayar retribusi pelayanan pasar. Setelah itu UPT Pasar Liwa memberikan izin menempati lapak dan memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan. Tetapi dalam praktinya pelayanan keamanan ini belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap para pedagang apabila ada barang para pedagang yang hilang, sehingga berdampak pada pedagang yang merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan, dan merasa dirugikan.

Dalam pengambilan retribusi pelayanan pasar di Pasar Liwa Lampung Barat oleh UPT Pasar Liwa. Pemungutan tersebut diambil setiap hari pasar yaitu Minggu, Selasa dan Jum'at setiap pagi sampai siang, retribusi hanya dikenakan pada lapak-lapak yang beroperasi, besar tarif bermacam-macam berdasarkan ukuran stand masing-masing.

Dalam perjanjian sewa disini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi (UPT Pasar Liwa). Pada awal perjanjian dimulai, upt pasar Liwa mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah (lapak) dan mendapatkan pelayanan lainnya yaitu pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan. Maka para pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yakni membayar uang retribusi pelayanan pasar pada saat los atau lapak beroperasi.

Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Liwa Lampung Barat adalah dengan pungutan dari lapak ke lapak. Pengambilan pungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan mulai jam 09.00 WIB sampai siang hari dikarenakan waktu pedagang membuka lapak yang tidak menentu. Yang dilakukan oleh petugas (UPT Pasar Liwa) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap lapak yang beroperasi saja, apabila lapak tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

Di dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh UPT Pasar Liwa. Petugas (UPT Pasar Liwa) membersihkan pasar setiap hari Minggu, Selasa dan Jum'at setelah pasar ditutup sampai selesai.

Di samping itu untuk pelayanan keamanan, petugas (UPT Pasar Liwa) memberikan pelayanan tersebut tetapi peraturan retribusi keamanan ini tidak ada didalam perbup No. 55 Tahun 2019 sehingga beberapa para pedagang merasa keberatan untuk membayar retribusi jasa keamanan tersebut.

Di dalam pelaksanaannya UPT Pasar Liwa melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap hari dari hari minggu, selasa dan jum'at. Dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan dari pembayaran retribusi pelayanan pasar adalah yang pertama, izin menempati atau berjualan di lapak, dan yang kedua, pelayanan lainnya yaitu pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Pelayanan kebersihan dilaksanakan pada hari minggu, selasa dan jum'at setelah pasar ditutup sampai selesai.

Dan pada retribusi pelayanan keamanan disini membuat penulis mengalami kejanggalan karena seharusnya pelayanan keamanan tidak ada di dalam perbup No. 55 Tahun 2019 tetapi pelaksanaan di lapangan khususnya pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat telah diadakan dan telah dijalani selama bertahun tahun oleh UPT pengelola pasar Liwa.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemungutan Retribusi Pasar Yang Ada Di Pasar Liwa Lampung Barat

Dalam penetapan besarnya kharaj, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Dalam penerapan di pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa disamakan dengan pedagang menyewa lapak pasar dengan jumlah sewanya dihitung seberapa luas lapak yang akan disewa tersebut dan nominal sewanya berdasarkan peraturan Bupati Lampung Barat No.55 Tahun 2019 tentang retribusi pasar.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada para janda, dan orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Dalam hal ini manfaat dari hasil retribusi di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat yaitu digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan di lampung barat contohnya seperti memperbaiki fasilitas pasar apabila ada yang rusak, menggaji UPT pasar dll.

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka memeluk islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Jizyah diwajibkan untuk orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh, dan mampu membayarnya. Untuk besaran jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah. Dalam penerapan retribusi pasar adalah peraturan Bupati, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar jizyah. Apabila jizyah diberlakukan kepada orang yang mampu, sementara dia keberatan

membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang. Dalam penerapan retribusi pasar ini penyewa wajib membayar sewaan yang telah ia gunakan untuk berdagang tanpa terkecuali.

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan Ahlu Dzimmah dan kafir Harbi yang melewati perbatasan negara khalifah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa khalifah Umar dan khalifah sesudahnya memungut Ushr dari pedagang yang melewati batas negara melalui pos-pos perbatasan. Ziyad ibn Judair mengatakan, Umar bin Khattab pernah memperkerjakan saya untuk memungut Ushr dan memerintahkan saya agar memungut 10% ushr dari perdagangan kaum muslimin. Ushr bisa disamakan dengan retribusi dan di dalam penerapannya UPT pasar yang bertugas memungut retribusi kepada para pedagang di Pasar Liwa.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’jir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, benda yang disewakan di istilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*Ujrah*”. *Ijarah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu. Dikatakan dalam bentuk *ijarah* karena, karena Upt pasar Liwa memberikan manfaat jasanya dan manfaat jasa tersebut pedagang pasar merasa terbantu karena mendapatkan izin menempati lapak dan mendapat pelayanan keamanan dan kebersihan.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu’jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma’jur*) kepada pihak penyewa (*Musta’jir*), dan dengan

diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).

Kemudian, *Shigat* ijab kabul adalah lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Dalam hal ini *Shigat* antara Upt pasar Liwa dan pedagang pasar Liwa Lampung Barat terjadi ketika pedagang ingin menempati lapak akan dikenakan retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Kemudian, *Ujrah* (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada penerapannya Upt pasar Liwa memungut retribusi pelayanan pasar setiap hari pasar sampai selesai.

Selanjutnya manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijarah* objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya upt pasar memberikan manfaat yang pertama, memberikan izin menempati lapak yang kedua memberikan pelayanan keamanan dan kebersihan. Dalam praktiknya pelaksanaan pelayanan keamanan dilaksanakan setiap hari pasar. Dalam praktik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini belum terpenuhi karena pelayanan keamanan apabila ada yang kehilangan barang dagangan para pedagang tidak diganti rugi sehingga membuat pedagang kurang puas atas pelayanan yang diberikan dan merasa dirugikan.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijarah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah mubah.

Didalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni pelaksanaan pelayanan keamanan di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat ini belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap barang-barang para pedagang yang seharusnya pihak pengelola kewanmanan ini harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

kehilangan barang para pedagang. Dari sini dapat dinilai bahwa praktik pelaksanaan pemungutan pelayanan pasar yang ada di pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat masih belum sejalan dengan hukum Islam (ijarah) karena manfaat dari sewa-menyewa jasa tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan atau kurang maksimal sehingga berakibat merugikan pengguna jasa, yakni para pedagang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Liwa Lampung Barat, belum terlaksana oleh masyarakat Pasar Liwa hasilnya dikarenakan penerapan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan Bupati di Pasar Liwa karena kebijakan peraturan dalam pengelola pasar berbeda dengan kebijakan peraturan Bupati Lampung Barat dimana dalam pengelolaan retribusi keamanan tidak ada dalam peraturan tetapi disahkan serta dijalankan oleh pengelola pasar liwa.
2. Menurut hukum Islam praktik pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan besarnya kharaj yaitu luas lapak sewaan yang disewakan UPT Pasar Liwa kepada para pedagang sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perbup dan sudah pula memenuhi ketentuan Ushr yaitu para pedagang membayar retribusi Pasar kepada UPT Pasar Liwa Lampung Barat yang telah ditentukan, namun belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yaitu manfaat jasa belum bisa diambil secara penuh. Tidak sah bagi UPT Pasar Liwa karena dalam *ijarah* tersebut jika manfaatnya tidak bisa diambil oleh pedagang.

B. Rekomendasi

Dengan adanya ketentuan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 di Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat, supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada

masyarakat (para pedagang pasar) sehingga tidak ada keraguan dan kejanggalan terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amnawaty, and Wati Rahmi Ria. "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 12, no. 3 (2015).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asri, Rani Hapasari Kusuma. "Analisis Perbandingan Sikap Konsumen Dalam Memilih Pasar Tradisional Dan Pasar Modern." Universitas Lampung, 2010.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2015.
- Cahyadi. "Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Gusfahmi. *Pajak Dan Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2004).
- . Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009).

Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Kapioru, Harlan Evan. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>.

Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

Lativah, Ainun. “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Muhammad, Abdul Qadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Putri, Aulia Nurisma. “Keuangan Publik Islam.” Aulian Putri Blogspot, 2019. <https://aulianputri.blogspot.com/2019/09/kharaj-dan-jizyah.html?m=1>.

Rahman, Muh Fudhail. “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2120>.

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rohandi. “Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010- 2014.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Setdakap Lampung Barat, Bagian Humas dan Protokol. “Selayang Pandang Kabupaten Lampung Barat, Menuju Kabupaten Literasi, Konsevasi Dan Siaga Bencana,.” Lampung Barat, 2018.

Soekirno, Sadono. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sofiah, Luvy, and Yhudistira Romadhon Ardiansyah. *Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

Syamsudin, Muhammad. “Pajak Tanah Di Masa Nabi Dan Di Masa Umar Bin Khatab.” NU Online, 2019. <https://islam.nu.or.id/post/read/102137/pajak-tanah-di-masa-nabi-dan-di-masa-umar-bin-khatha>.

Usban, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara Group, 2017.

Yogi. *Ekonomi Manajemen Pendekatan Analisis Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Wawancara

Bapak Nazir, Seksi Pendataan dan Penanganan Retribusi Pasar Kabupaten Lampung Barat, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Mustakrip, Petugas Pengelola Pasar Liwa, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Noviansyah, Kepala UPT Pasar Liwa, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Salafidin, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Kabupaten Lampung Barat, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Nurmatias, Pedagang Sembako Eceran dan Grosir, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Edi, Pedagang ikan laut, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.

Bapak Nandang, Pedagang Ikan tawar, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 22 Februari 2021.